



Article Informations  
Corresponding Email:  
stienhumaira@gmail.com

Received: 23/07/2025; Accepted:  
25/09/2025; Published: 15/10/2025

## **KEBIJAKAN PERTAHANAN TIONGKOK DALAM MENGEMBANGKAN SENJATA OTONOM BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM MENGHADAPI KEKUATAN MILITER AMERIKA SERIKAT TAHUN 2019-2024**

**Stien Nailat Humaira<sup>1</sup>, Jusmalia Oktaviani<sup>2</sup>, Bimbi Rianda<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

Dalam sistem internasional yang anarkis, Tiongkok memandang kehadiran militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik serta pembentukan aliansi seperti AUKUS dan QUAD sebagai ancaman terhadap ambisi nasionalnya, termasuk dalam mewujudkan “*China Dream*” dan “*The Great Rejuvenation*”. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Tiongkok semakin aktif memodernisasi alat pertahanannya sebagai strategi penyeimbang kekuatan melalui pengembangan senjata otonom berbasis kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan kebijakan pertahanan Tiongkok dalam mengembangkan senjata otonom berbasis *Artificial Intelligence* (AI) sebagai respons terhadap kekuatan militer Amerika Serikat tahun 2019 hingga 2024. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan pertahanan Tiongkok melalui pengembangan senjata otonom berbasis AI dalam perspektif hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme ofensif, konsep *balance of threat*, kepentingan nasional, *Artificial Intelligence*, dan kebijakan pertahanan dengan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kebijakan pertahanan Tiongkok mengembangkan senjata otonom berbasis *Artificial Intelligence* berorientasi pada kehadiran ancaman kekuatan militer Amerika Serikat.

**Kata Kunci:** Kebijakan pertahanan, artificial Intelligence, senjata otonom, Tiongkok, Amerika Serikat, balance of threat

### **Abstract**

*In an anarchic international system, China perceives the military presence of the United States in the Indo-Pacific region, along with the formation of alliances such as AUKUS and QUAD, as threats to its national ambitions, including the realization of the "China Dream" and the Great Rejuvenation. In response to these challenges and threats, China has increasingly modernized its military capabilities as a means of*

*balancing power, particularly through the development of autonomous weapons based on Artificial Intelligence (AI). The general objective of this research is to explain the rationale behind China's defense policy in developing AI-based autonomous weapons as a response to the military power of the United States from 2019 to 2024. The specific objective is to understand China's defense policy regarding the development of AI-based autonomous weapons within the framework of international relations. This study employs the theoretical approaches of offensive neorealism, the balance of threat, national interest, Artificial Intelligence, and defense policy, using a qualitative research method. The findings of this study aim to reveal the underlying reasons behind China's defense policy in developing AI-based autonomous weapons in response to the military strength of the United States during the 2019–2024 period.*

**Keywords:** *defense policy, artificial intelligence, autonomous weapons, China, United States*

## **1. PENDAHULUAN**

Sistem internasional saat ini berada dalam kondisi anarki, yaitu ketiadaan otoritas pusat yang dapat mengatur perilaku negara-negara secara menyeluruh. Dalam struktur yang demikian, negara dipaksa bertindak secara otonom untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepentingan nasionalnya. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah modernisasi kekuatan militer, termasuk melalui teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)*. AI telah menjadi simbol kekuatan baru dalam Revolusi Militer abad ke-21, khususnya melalui pengembangan sistem senjata otonom (*Autonomous Weapon System/AWS*).

Dalam konteks ini, Tiongkok sebagai kekuatan besar yang tengah bangkit, memandang kehadiran Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik serta pembentukan aliansi seperti AUKUS dan QUAD sebagai ancaman strategis bagi ambisi nasionalnya, terutama visi "*China Dream*" dan "*The Great Rejuvenation*" yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping. Tiongkok kemudian mempercepat modernisasi militernya melalui pengembangan senjata otonom berbasis AI sebagai strategi *balancing* terhadap dominasi militer Amerika Serikat (Walt, 1985).

Pengembangan sistem persenjataan ini tidak hanya merupakan jawaban atas kemajuan militer negara-negara pesaing, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk mencapai status militer "kelas dunia" pada pertengahan abad ke-21 sebagaimana termuat dalam *White Paper on China's National Defense in the New Era* (2019). Kebijakan tersebut

mengandalkan integrasi AI melalui pendekatan *intelligentization* dan program *Military-Civil Fusion* (MCF), yakni penggabungan kemampuan sektor sipil dan militer guna mempercepat inovasi pertahanan.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya potensi konflik dan ketegangan militer antara Tiongkok dan Amerika Serikat, yang dapat berdampak terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan mengubah konstelasi keamanan global. Penelitian ini penting untuk menjelaskan bagaimana kebijakan pertahanan Tiongkok dalam konteks anarki internasional berupaya menciptakan keseimbangan ancaman (*balance of threat*) serta mengejar superioritas teknologi dalam medan perang masa depan (Mearsheimer, 2001).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan kebijakan pertahanan Tiongkok dalam mengembangkan senjata otonom berbasis kecerdasan buatan (AI) selama periode 2019–2024 merupakan respons terhadap dominasi kekuatan militer Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendekatan neorealisme ofensif, konsep kepentingan nasional, dan teori *balance of threat* digunakan untuk membaca strategi Tiongkok dalam membangun keunggulan militer berbasis teknologi.

Tinjauan pustaka yang digunakan antara lain mencakup studi oleh Bachle dan Bareis (2022) yang menganalisis AWS sebagai simbol geopolitik dalam persaingan kekuatan nasional, dan Al Syahrin (2018) yang menjelaskan rivalitas keamanan AS-Tiongkok di Asia Pasifik. Kedua referensi tersebut memperkuat kerangka analisis terhadap motivasi dan arah kebijakan militer Tiongkok berbasis teknologi AI.

Hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan pertahanan Tiongkok dalam pengembangan senjata otonom berbasis AI merupakan bagian dari strategi *balancing* terhadap ancaman militer Amerika Serikat, serta sebagai langkah strategis menuju dominasi teknologi militer di tataran global.

## **2. PEMBAHASAN**

Dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, negara tidak memiliki otoritas pusat yang mampu menjamin keamanan mutlak. Oleh karena itu, negara bertindak sebagai aktor rasional yang akan mengupayakan keamanan dan eksistensinya secara mandiri. Tiongkok melihat dominasi Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik sebagai bentuk hegemoni yang menghambat pencapaian ambisi nasional seperti “*China Dream*” dan “*The Great Rejuvenation*”. Terlebih, inisiatif pertahanan seperti AUKUS dan QUAD, kebijakan oleh Amerika Serikat yang mendorong *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) di Laut China Selatan semakin memperkuat persepsi Tiongkok bahwa kehadiran militer Amerika Serikat tidak hanya sekadar penyeimbang kekuatan regional, tetapi juga dapat mengancam klaim kedaulatan Tiongkok di jalur pelayaran strategis tersebut. Sehingga Tiongkok menganggap segala aktivitas tersebut sebagai upaya AS untuk membendung kebangkitannya sebagai kekuatan global (Mearsheimer, 2001). Situasi ini menimbulkan kondisi *security dilemma*, di mana peningkatan kekuatan satu negara mendorong negara lain untuk mempersenjatai diri lebih lanjut demi menciptakan keseimbangan kekuatan dan ancaman.

Menurut Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti, kebijakan pertahanan negara dihasilkan dari empat faktor utama, yaitu (1) Kondisi lingkungan internasional, (2) Tujuan Nasional, yang mencakup strategi dan doktrin pertahanan negara, (3) Proses pembuatan kebijakan pertahanan, dan (4) berbagai isu yang sedang terjadi. (Murray & Viotti, 1992)

## **2.1 Kebijakan Pertahanan Tiongkok Sebagai Respons Terhadap Kondisi Lingkungan Internasional**

Lingkungan internasional dalam era kontemporer menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi titik panas rivalitas strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Sejak 2019, Amerika Serikat telah secara aktif meningkatkan kehadiran militernya di kawasan ini, termasuk penguatan armada Angkatan laut di Laut China Selatan serta pelaksanaan latihan militer bersama dengan sekutu-sekutunya. Dokumen *Indo-Pacific Strategy of the United States* (2022)

menegaskan komitmen AS untuk mempertahankan “kebebasan navigasi” dan mencegah dominasi satu kekuatan tunggal di kawasan strategis tersebut, (The White House, 2022). Sejalan dengan itu, *Department of Defense Indo-Pacific Strategy Report 2019* menyatakan bahwa Tiongkok dipandang sebagai *pacing challenge*, yaitu tantangan utama yang harus diantisipasi secara strategis. Implementasi dari strategi ini mencakup penambahan kehadiran kapal induk, pesawat tempur, serta penguatan pangkalan militer di Guam, Jepang, dan Korea Selatan, (U.S. Departmen of Defense, 2019). Bahkan, Ely Ratner selaku *Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs* menyebutkan “*building a combat-credible force posture in the Indo-Pacific*”. AS tengah “membangun postur kekuatan yang kredibel untuk tempur di kawasan Indo-Pasifik” guna mengimbangi ekspansi militer dan teknologi pertahanan Tiongkok, (Jim Garamone, 2022).

Manifestasi konkret dari strategis Amerika Serikat adalah pembentukan aliansi keamanan seperti AUKUS, kerja sama trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang diumumkan pada 2021. Aliansi tersebut berfokus pada penguatan keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik melalui peningkatan militer dengan transfer teknologi pertahanan mutakhir, termasuk kapal selam bertenaga nuklir dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Selain AUKUS, kehadiran Amerika Serikat juga diperkuat melalui QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*), yang menggabungkan AS, India, Jepang, dan Australia dalam kerangka kerja sama keamanan yang semakin agresif terhadap pengaruh Tiongkok. Dalam Nato Summit 2022, AS juga mendorong konsep “*NATO-Asia Pacific*” yang juga disebut oleh beberapa pengamat, dimana konsep tersebut melalui jalinan hubungan yang lebih erat dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru untuk membendung kebangkitan militer Tiongkok, (NATO,2022).

Konflik di Laut China Selatan semakin memperburuk situasi dimana wilayah yang kaya sumber daya ini diklaim hampir sepenuhnya oleh Tiongkok melalui peta “*nine-dash line*”, namun dikontestasi oleh negara-negara ASEAN dan ditentang oleh Amerika Serikat. AS secara rutin mengirim kapal perang dalam misi *Freedom of Navigation Operations* (FONOPs) untuk menentang klaim Tiongkok. Mendasari pengakuan dokumen resmi *white*

*paper* Tiongkok 2019 yang menyebut penempatan kapal dan pesawat asing di dekat teritori mereka sebagai “provokasi”, (White Paper, 2019).

Sejalan dengan merespons tekanan eksternal tersebut, Tiongkok menerbitkan *China’s National Defense In the New Era* pada 2019, salah satu daripada isinya menegaskan bahwa modernisasi militer harus memasukan elemen “intelligentisasi perang”, di mana AI menjadi pusat dalam sistem komando, pengintaian, dan pertahanan. Strategi ini dijabarkan pula melalui *New Generation Artificial Intelligence Development Plan* (AIDP) dan *Military-Civil Fusion*, yang mendorong kolaborasi teknologi sipil-militer dan mempercepat penerapan senjata otonom berbasis AI. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan respons teknologi dalam menghadapi AS serta ancaman regional yang berkembang.

## **2.2 Tujuan Nasional, Strategi dan Doktrin Pertahanan Tiongkok**

Tujuan nasional daripada kebijakan pertahanan Tiongkok adalah untuk melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional sebagai instrumen utama dalam mencapai “*China Dream*” melalui peningkatan kemampuan pertahanannya dalam menjamin keamanan negara terhadap intervensi asing. Berdasarkan *China’s National Defense in The New Era in 2019*, dokumen tersebut secara konkret menyebutkan bahwa negara wajib menolak agresi, mempertahankan kesatuan dan integritas wilayah termasuk Taiwan, Tibet, dan Xianjiang. Serta memastikan keamanan politik, sosial, dan maritime, (White Paper, 2019). Kebijakan ini juga mencakup pengamanan domain baru seperti ruang angkasa, siber, dan elektromagnetik, serta kepentingan luar negeri Tiongkok. Berangkat dari itu, terkait ambisi global Tiongkok, dokumen tersebut menetapkan target transformasi militer yang berisi “mekanisasi dan informatika pada 2020, modernisasi militer pada 2035, dan angkatan besenjata kelas dunia pada pertengahan abad ini”. Ambisi ini menggambarkan arah strategis negara yang ingin mencapai kepentingan nasionalnya untuk mencapai kekuatan militer utama sejak kebijakan *Made in China 2025* hingga AIDP.

Tiongkok dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya adalah melalui strategi dan doktrin militer yang berakar pada prinsip *active defense*,

yakni pendekatan militer yang bersifat defensif secara deklaratif, namun dapat bersifat ofensif secara taktis jika menghadapi ancaman nyata. *White Paper* 2015 dan 2019 secara eksplisit menyatakan “kami tidak akan menyerang kecuali diserang, namun akan membalas dengan tindakan tegas bila diserang”, (China’s Military Strategy White Paper 2015 & White Paper 2019). Lebih lanjut, menurut Shou (2017), bahwa doktrin Tiongkok telah bergeser dari “*informatization warfare*” menuju “*intelligentized warfare*”, dimana AI dan data menjadi pilar dominan dalam skenario militer masa depan, (Shou,H. 2019).

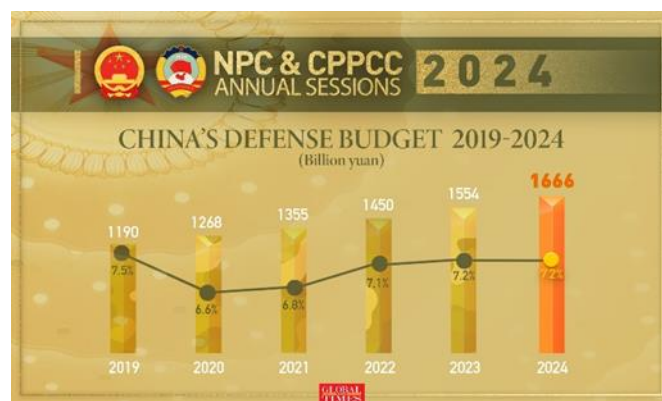
Sejak 2017, Xi Jinping memerintahkan percepatan *intelligentization* sejak Kongres Partai ke-19 pada 2017. Strategi ini bukan hanya mengintegrasikan teknologi AI, komputasi awan, dan big data dalam sistem senjata dan operasi militer, tetapi mendobrak paradigma lama dengan merancang “*command brain*”, *drone swarm* otomatis, dan analisis intelijen real-time untuk mencapai *Multi-Domain Precision Warfare* yang menyerang titik-titik lemah sistem lawan dan melumpuhkan jaringan musuh, (Jacob Stokes, 2019). Pendekatan tersebut bertujuan membangun superioritas informasi dan respons cepat dalam berbagai domain tempur, termasuk darat, laut, udara, siber, dan luar angkasa. Yang dalam praktiknya, direalisasikan melalui pembentukan pasukan cabang baru dalam PLA (*People’s Liberation Army*) seperti *Strategic Support Force* yang fokus pada bidang peperangan elektronik dan siber, serta penguatan komando terpadu antar-matra, yang mempercepat respons dan efektivitas militer dalam berbagai skenario pertempuran, (U.S. Department of Defense, 2022).

Dalam mengimplementasikan strategi pertahanannya, Tiongkok melakukan beberapa cara diantaranya adalah penguatan kapasitas industri pertahanan, investasi dalam teknologi AI, serta kolaborasi antara sipil dan militer melalui skema *Military-Civil Fusion* (MCF). Melalui AIDP (*Artificial Intelligence Development Plan*) yang diluncurkan pada 2017, Tiongkok mendorong Universitas, perusahaan teknologi, dan institusi militer untuk mengembangkan sistem otonom seperti *drone swarm*, sistem pengenalan wajah militer, dan *command-brain systems*. Selain itu program *Made in China 2025* pula menjadi sarana penting dalam memastikan kemandirian teknologi

dan logistik pertahanan nasional, termasuk produksi chip semikonduktor dan sistem navigasi Beidou.

Lebih lanjut, strategi Tiongkok melalui anggaran pertahanan terus meningkat setiap tahunnya, dengan total mencapai sekitar US\$224 miliar pada tahun 2022 dan meningkat menjadi US\$296 miliar pada tahun 2023 menurut data dari *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), (SIPRI, 2024). Kenaikan ini juga tergambar dalam laporan resmi sidang tahunan NPC & CPPCC, yang menunjukkan tren anggaran dalam satuan yuan dari tahun 2019 hingga 2024. Dalam periode tersebut, anggaran pertahanan meningkat dari 1.190 miliar yuan pada 2019 menjadi 1.666 miliar yuan pada 2024, dengan laju pertumbuhan tahunan yang konsisten di atas 6%, (Global Times, 2024). Konsistensi kenaikan ini menandai upaya intensif Tiongkok dalam memperkuat kapasitas militernya melalui pengembangan teknologi mutakhir, termasuk sistem persenjataan otonom berbasis kecerdasan buatan.

*Gambar 2.2 Tren Anggaran Pertahanan Tiongkok 2019-2024  
(dalam miliar yuan)*



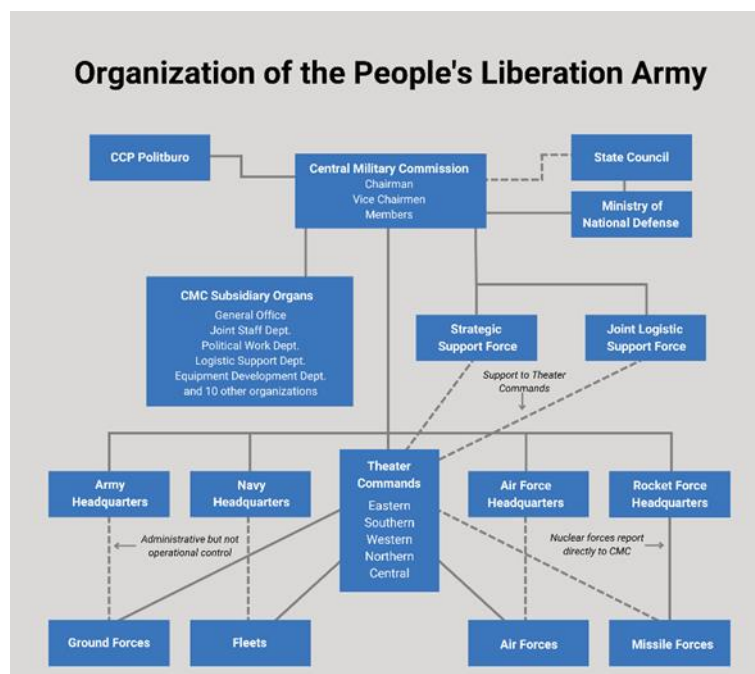
*(Global Times, 2024)*

### **2.3 Proses Pembuatan Kebijakan Pertahanan Tiongkok**

Tiongkok, sebagai negara dengan sistem politik satu partai di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT), memiliki struktur pengambilan keputusan yang tersentralisasi. Berbeda dengan negara demokratis yang memisahkan antara militer dan sipil, struktur pengambilan keputusan bidang pertahanan di Tiongkok justru ditentukan oleh organ-

organ partai dan lembaga negara yang saling terkait. Terdapat tiga aktor utama dalam proses ini, yakni Komite Sentral PKT, Komisi Militer Pusat (*Central Military Commission/CMC*), dan Dewan Negara bersama Kementerian Pertahanan Nasional. CMC sendiri merupakan aktor utama dalam proses ini karena memiliki kewenangan tertinggi dalam menyusun kebijakan militer, menentukan struktur kekuatan PLA, serta mengendalikan seluruh jalur komando dan anggaran militer. CMC dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal PKT, yang juga Presiden negara, Xi Jinping, (Fravel, M.T, 2019). Menjadikan proses perumusan kebijakan sangat terkonsentrasi pada pimpinan partai.

Gambar 2.3 Struktur CMC dan lembaga pendukung utama



(China Power.CSIS)

Gambar diatas memperlihatkan bagaimana *Central Military Commission* (CMC) berada di pusat struktur, mengendalikan berbagai departemen, (Lin, Bonny, et al). Sejak tahun 2014, CMC membentuk *Leading Group for National Defense and Military Reform*, yakni badan kebijakan tingkat tinggi yang merancang dan mengimplementasikan reformasi militer besar-besaran, termasuk reformasi struktur komando, modernisasi

kekuatan militer, serta reformasi dalam hal integrasi sipil-militer, (Mastro, O.S, 2019). Reformasi ini mendukung kebijakan pertahanan yang berfokus pada “*intelligentized warfare*”, yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan untuk keunggulan strategis.

Di sisi administratif, State Council dan *National People’s Congress* (NPC) bertanggung jawab mengesahkan regulasi dan anggaran pendukung kebijakan pertahanan, termasuk dalam Rencana Lima Tahunan dan legislasi seperti *National Defense Mobilization Law*. Dalam keadaan darurat, *National Defense Mobilization Commission* yang berada di bawah CMC dan State Council akan mengatur mobilisasi sumber daya sipil untuk mendukung kesiapan militer nasional, (State Council of the People’s Republic of China, 2020). Lebih lanjut, kebijakan pertahanan Tiongkok juga ditentukan melalui skema manajemen berorientasi siklus:

Perencanaan → Penganggaran → Pelaksanaan → Evaluasi.

Evaluasi dilakukan oleh Komisi Pengawasan CMC dan lembaga sipil-militer lainnya guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan strategi nasional jangka panjang. Dalam hal kebijakan berbasis teknologi, Tiongkok mengintegrasikan strategi pertahanannya dengan proyek-proyek seperti *Made in China 2025*, *Military-Civil Fusion*, dan *New Generation Artificial Intelligence Development Plan (AIDP)*. Terlihat dalam pengembangan senjata otonom, sistem pengintaian berbasis AI, serta pengembangan jaringan sensor militer yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti CETC, *PLA Academy of Military Science*, dan CAS, (Elsa B.Kania, 2019).

*Tabel 2.3 Peran Lembaga Tiongkok dalam Pengembangan Senjata Otonom Berbasis AI*

Nama Lembaga	Kontribusi
<i>China Electronics Technology Group Corporation (CETC)</i>	Mendeteksi ancaman siber, manajemen logistik prediktif, dan sistem AI edge yang dapat berjalan pada perangkat ringan di garis depan.
<i>PLA Acedemy of Military Science (AMS)</i>	Terkait doktrin dan etika dalam pertimbangan teknis AI militer, seperti tanggung jawab apabila senjata AI keliru identifikasi target dan memicu krisis moral

<i>Chinese Academy of Sciences</i> (CAS)	CAS melalui institut seperti <i>Institute of Automation</i> (CASIA) dan <i>Institute of Computing Technology</i> (ICT) mengembangkan riset AI termasuk robot humanoid, chip AI, dan AI untuk kendaraan otonom
---	---

Ketiga lembaga tersebut berkolaborasi di *bawah Unit Strategic Support Force* dan *Military–Civil Fusion Bureau* yang merupakan platform utama untuk sinkronisasi teknologi sipil-militer, termasuk pengembangan AI militer dan senjata otonom. Yang selanjutnya oleh *Political Work Department* dan komisioner politik (*political commissars*) memastikan kepatuhan ideologis di setiap level militer, menjamin bahwa kebijakan pertahanan mengikuti garis Partai. Dimana setiap kebijakan pertahanan harus mendapatkan persetujuan dari Politbiro PKT, dan seluruh struktur militer dikontrol secara ketat oleh sistem politik melalui keberadaan *political commissars* sampai ke level batalion. Hal tersebut untuk memastikan loyalitas ideologis terhadap arahan partai, serta memperkuat konsolidasi kekuasaan militer oleh Presiden Xi Jinping.

#### **2.4 Isu Yang Memengaruhi Kebijakan Pertahanan Tiongkok**

Suatu peristiwa atau isu yang terjadi dan mampu menyita perhatian masyarakat secara global merupakan definisi dari isu global. Berbagai isu yang muncul akan berdampak baik secara positif maupun negatif bagi suatu negara. Isu yang sedang hangat akan membuat negara mengambil langkah yang kemudian disebut dengan kebijakan. Kebijakan yang dibuat tentunya harus sesuai dengan kepentingan suatu negara, misalnya kebijakan pertahanan. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, salah satu isu sentral adalah persaingan dalam penguasaan teknologi, khususnya teknologi kecerdasan buatan (AI), yang menjadi perhatian serius bagi negara-negara besar, terutama Tiongkok dan Amerika Serikat.

Persaingan teknologi ini, terutama dalam bidang militer, menjadi bagian integral dari rivalitas strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat. AS menilai dominasi teknologi AI Tiongkok sebagai ancaman terhadap stabilitas global dan keunggulan strategisnya, sehingga merespons melalui

sanksi, pembatasan teknologi, dan pembentukan aliansi seperti AUKUS untuk mempercepat pengembangan teknologi militer canggih. Dalam menanggapi situasi ini, Tiongkok merumuskan kebijakan pertahanan yang secara eksplisit memasukkan AI sebagai bagian dari strategi nasional, sebagaimana tertuang dalam *China's National Defense in The New Era* dan *Artificial Intelligence Development Plan (AIDP)*. Dalam dokumen tersebut, Tiongkok menekankan pentingnya "intelligentisasi perang", yaitu integrasi AI dalam seluruh aspek pertahanan, mulai dari sistem senjata hingga pengambilan keputusan militer.

Lebih jauh, ancaman non-tradisional seperti *cyber warfare* dan *weaponized AI* juga turut memengaruhi kebijakan pertahanan Tiongkok. Dalam menghadapi potensi kerentanan pada sistem pertahanan siber tersebut, Tiongkok membentuk *Strategic Support Force (SSF)* dalam struktur PLA untuk menangani peperangan elektronik dan dunia maya secara khusus. Pembentukan unit ini merupakan bentuk adaptasi langsung terhadap ancaman kontemporer.

Selain itu, pergeseran tatanan global ke arah multipolar, di mana kekuatan-kekuatan seperti Rusia, India, dan Uni Eropa mulai menantang dominasi AS, juga mendorong Tiongkok untuk meningkatkan posisi strategisnya di kawasan dan global. Dalam hal ini, kebijakan pertahanan Tiongkok menjadi lebih proaktif, dengan memperkuat kerja sama militer dengan negara-negara Global South, memperluas teknologi *dual-use* melalui program *Military-Civil Fusion*, serta menolak bentuk dominasi tunggal dalam tatanan internasional. Dengan demikian, isu-isu global seperti rivalitas teknologi, ancaman siber, dan multipolaritas dunia bukan hanya menjadi latar belakang pasif, melainkan berperan langsung dalam membentuk kebijakan pertahanan Tiongkok. Tiongkok merespons berbagai isu ini dengan kebijakan pertahanan yang adaptif, berbasis teknologi mutakhir, dan selaras dengan ambisi strategis nasionalnya untuk menjadi kekuatan militer kelas dunia pada pertengahan abad ke-21.

## **2.5 Dampak Kebijakan Pertahanan Tiongkok terhadap Stabilitas Keamanan Regional dan Global**

Pengembangan senjata otonom berbasis *Artificial Intelligence* (AI) oleh Tiongkok menimbulkan dampak terhadap tatanan keamanan regional dan global. Langkah strategis ini bukan hanya mencerminkan transformasi teknologi militer Tiongkok, tetapi juga memperbesar kompleksitas ketegangan dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan. Sejak diperkenalkannya rencana pengembangan kecerdasan buatan dalam kerangka kebijakan nasional pertahanan, terutama melalui integrasi AIDP 2017 dan agenda *Military Civil-Fusion*. Tiongkok terus mengakselerasi kapabilitas senjata otonomnya seperti *drone swarm*, kendaraan tempur tak berawak, serta sistem komando berbasis AI. Peningkatan ini menjadi perhatian bagi negara-negara di kawasan dan komunitas internasional, karena memperkuat asumsi bahwa Tiongkok tengah membangun keunggulan militer berbasis teknologi untuk menandingi dominasi militer Amerika Serikat.

Dalam studi hubungan internasional, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep "*security dilemma*", di mana tindakan satu negara dalam memperkuat pertahanannya meskipun bersifat defensif namun dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, sehingga memicu aksi balasan militer. Perlombaan AI militer antara AS dan Tiongkok menggambarkan fenomena ini secara nyata, dimana AS dan sekutunya, seperti Jepang dan Australia, secara eksplisit menyampaikan kekhawatiran bahwa pengembangan senjata otonom oleh Tiongkok berpotensi mengganggu keseimbangan strategis dan menurunkan ambang batas penggunaan kekuatan secara ofensif, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang penuh ketegangan geopolitik, (Michael C.H, Paul Scharre. Et al, 2019)

Tiongkok, dalam pandangan *Balance of Threat Theory* dari Stephen Walt, justru memandang kehadiran dan aktivitas militer AS sebagai faktor ancaman utama yang mendorong mereka mempercepat inovasi pertahanan. Hal ini tercermin dari respons terhadap pembentukan aliansi seperti AUKUS dan penguatan QUAD, serta ekspansi NATO ke ranah Asia-Pasifik. Perkembangan ini dilihat oleh Beijing sebagai upaya pengepungan strategis yang dapat mengancam kepentingan nasional dan integritas teritorialnya, terutama di wilayah sensitif seperti Laut China Selatan dan Taiwan. Oleh

karena itu, pengembangan senjata otonom dilihat sebagai bentuk *counter-balance* untuk menghadapi tekanan tersebut dan mempertahankan keunggulan regional hingga global.

Lebih lanjut, perlombaan senjata otonom antara AS dan Tiongkok juga meningkatkan risiko eskalasi konflik yang tak terkendali. Dimana senjata berbasis AI sendiri beroperasi dengan algoritma kompleks yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara independen dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun efisien, kecepatan dan otomatisasi ini juga mengandung risiko kesalahan interpretasi dan ketidaktepatan target, yang dapat memicu konflik berskala besar akibat malfungsi atau mispersepsi, (Heramb.P. & Alycia, C, 2025). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas jangka panjang, terlebih belum terdapat kesepakatan global mengenai regulasi senjata otonom.

Secara regional, stabilitas kawasan Indo-Pasifik menjadi semakin rapuh. Data dari AP News menunjukkan bahwa perlombaan pengembangan *drone swarm* oleh Tiongkok dan AS berpotensi memicu arms race baru yang berdampak pada negara-negara di sekitarnya. Misalnya, Taiwan telah mengembangkan sistem *sea-drone* sebagai respons terhadap tekanan militer Tiongkok, sementara AS memperkuat kehadiran militernya di Laut China Selatan dan Pasifik Barat sebagai bagian dari strategi penyeimbangan kekuatan, (Frank Bajak, 2024). Langkah-langkah tersebut tidak hanya mempertinggi tensi militer, tetapi juga mengganggu ruang diplomasi damai di kawasan.

Ketiadaan kerangka hukum internasional yang spesifik mengenai senjata otonom pula turut memperbesar ancaman global. Tidak adanya norma atau kesepakatan multilateral mengenai batasan pengembangan dan penggunaan senjata berbasis AI memungkinkan negara-negara untuk bergerak secara unilateral, sehingga meningkatkan risiko proliferasi teknologi ke aktor non-negara. Dalam kondisi ini, senjata AI menjadi ancaman serius terhadap tatanan hukum internasional dan arsitektur keamanan global. Dengan begitu, kebijakan pertahanan Tiongkok dalam mengembangkan senjata otonom berbasis AI tidak hanya berdampak pada penguatan postur militernya, tetapi juga mendorong konfigurasi baru dalam

keamanan internasional. Kebijakan ini menciptakan tekanan terhadap sistem keseimbangan kekuatan, mendorong perlombaan teknologi militer, serta memperbesar celah keamanan hukum global, terutama dalam konteks interaksi strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

### **3. KESIMPULAN**

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa alasan utama Tiongkok mengembangkan kebijakan pertahanan melalui senjata otonom berbasis *Artificial Intelligence* (AI) pada periode 2019–2024 adalah karena meningkatnya tekanan eksternal dari Amerika Serikat. Kehadiran militer AS di kawasan Indo-Pasifik, pembentukan aliansi seperti AUKUS dan QUAD, serta dinamika Laut China Selatan yang menciptakan ancaman terhadap kepentingan nasional dan stabilitas regional Tiongkok. Berdasarkan teori kebijakan pertahanan dari Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi arah kebijakan pertahanan Tiongkok, yaitu: kondisi lingkungan internasional yang semakin kompetitif, tujuan nasional yang terfokus pada pertahanan kedaulatan dan pembangunan militer, proses pengambilan keputusan strategis oleh kepemimpinan Xi Jinping, serta isu-isu kontemporer seperti ancaman *cyber warfare*, *weaponized AI*, dan rivalitas teknologi.

Tiongkok merespons tantangan tersebut dengan memperkuat doktrin *active defense*, membentuk unit *Strategic Support Force* (SSF), mendorong integrasi teknologi militer-sipil melalui *Military-Civil Fusion*, serta mengembangkan strategi *intelligentized warfare* yang menjadikan AI sebagai pilar utama pertahanan masa depan. Seluruh kebijakan ini tidak hanya bertujuan mempertahankan keamanan nasional, tetapi juga mendukung ambisi global Tiongkok dalam mewujudkan “*China Dream*” dan menjadi kekuatan militer kelas dunia pada pertengahan abad ke-21. Sehingga kebijakan ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak sekadar bereaksi terhadap tekanan global, melainkan berusaha aktif membentuk tatanan kekuatan baru berbasis teknologi militer. Namun, kebijakan dan strategi ini menimbulkan *security dilemma* di kawasan dan global, karena

pengembangan senjata otonom tanpa regulasi internasional dapat memicu perlombaan senjata dan ketidakstabilan geopolitik.

## **REFERENSI**

- Al Syahrin, M. Najeri. "*Tiongkok Versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya di Kawasan Asia Pasifik.*" *Jurnal Global & Strategis*, vol. 12, no. 1, (2018), pp. 145-163.
- Bachle, T. Christian, and Jascha Bareis. "*Autonomous Weapons as a Geopolitical Signifier in a National Power Play: Analysing AI Imaginaries in Chinese and US Military Policies.*" *European Journal of Futures Research*, vol. 10, no. 1, (2022), p. 20.
- Bajak, Frank. "*US-China Competition to Field Military Drone Swarms Could Fuel Global Arms Race.*" *AP News*, (2024). Diakses pada 04 Juli 2025 dari <https://apnews.com/article/us-china-drone-swarm-development-arms-race-e5808a715415d709f466da00cdeab10f>.
- "*China's Defense Budget 2019–2024.*" *Global Times*, 2024, NPC & CPPCC Annual Sessions.
- Dokumen State Council Information Office of the People's Republic of China, 2019, *China's National Defense in the New Era* (Beijing: Foreign Languages Press, 2019), hlm.7.
- Fravel, M. Taylor. "*Active Defense: China's Military Strategy Since 1949*". Princeton University Press, (2019).
- Garamone, Jim. "*Defense Official Says Indo-Pacific Is the Priority Theater; China Is DOD's Pacing Challenge.*" U.S. Department of Defense, (2022). Diakses pada 01 Juli 2025 dari <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2961183/defense-official-says-indo-pacific-is-the-priority-theater-china-is-dods-pacing/>
- Heramb, P., and C. Alycia. "*Technical Risks of Lethal Autonomous Weapons.*" *arXiv.org*, 2025.
- Kania, Elsa B. "*Chinese Military Innovation in Artificial Intelligence.*" Center for a New American Security, (2019), diakses pada 04 Juli 2025 dari

<https://www.airuniversity.af.edu/JIPA/Display/Article/2980879/artificial-intelligence-technology-and-chinas-defense-system/>

- Lin, Bonny, et al. "How Did the 20th Party Congress Impact China's Military?" ChinaPower Project, Center for Strategic and International Studies. Diakses pada 03 Juli 2025 dari <https://chinapower.csis.org/20th-party-congress-china-military-pla-cmc/>.
- Mastro, Oriana Skylar. "The Stealth Superpower: How China Hid Its Global Ambitions." *Foreign Affairs*, vol. 98, no. 1, 2019, pp. 31–39.
- Mearsheimer, John J. "The Tragedy of Great Power Politics". W. W. Norton & Company, (2001).
- Michael, C. H., Paul Scharre, et al. "A Stable Nuclear Future? The Impact of Autonomous Systems and AI." arXiv, 2019, arXiv:1912.05291.
- Murray, Douglas J., and Paul R. Viotti, editors. "The Defense Policies of Nations: A Comparative Study". 3rd ed., Johns Hopkins University Press, (1992).
- NATO. "Madrid Summit Declaration". (2022). Diakses pada 01 Juli 2025. [https://www.nato.int/cps/en/natohq/official\\_texts\\_196951.htm](https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm)
- Shou, Hu. "Intelligentized Warfare and the PLA's Future Strategic Posture." *China Military Science*, vol. 4, no. 1, (2019), pp. 55–71.
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). "Trends in World Military Expenditure", (2024).
- Stokes, Jacob, et al. "Military Artificial Intelligence, the People's Liberation Army, and U.S.-China Strategic Competition". Center for a New American Security, (2024), diakses pada 19 April 2025 dari [www.cnas.org/publications/reports/military-ai-pla-us-china-strategic-competition](http://www.cnas.org/publications/reports/military-ai-pla-us-china-strategic-competition).
- The White House. "Indo-Pacific Strategy of the United States". (2022). Diakses pada 01 Juli 2025 dari <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf>.
- U.S. Department of Defense. "Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the PRC". 2022
- Walt, Stephen M. "Alliance Formation and the Balance of World Power." *International Security*, vol. 9, no. 4, (1985), pp. 3–43.